



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKJIP

TAHUN 2025

DINAS SOSIAL
KABUPATEN SOLOK

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2025 -2029 dan Rencana Kerja Tahunan 2025, yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025.

Penyusunan LkjIP Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2025 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2025. Dalam upaya merealisasikan good governance, Dinas Sosial Kabupaten Solok telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2025-2029.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Solok telah merencanakan dan melaksanakan 6 Program 14 Kegiatan sesuai dengan skala prioritas melalui APBD Kabupaten Solok dan sumber dana Tahun Anggaran 2025, untuk mendukung pencapaian 2 Sasaran dalam 2 Indikator (Outcome /Output) yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dengan alokasi anggaran sebesar 5.863.438.212,- (Lima miliar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua belas rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 5.537.485.249,- (Lima miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan penyerapan sebesar 94,44%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	II
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan tujuan	2
1.3 Struktur Organisasi	2
1.4 Sumber Daya Manusia	5
1.5 Sarana dan Prasarana	5
1.6 Keuangan	6
1.7 Sistematika Penyajian	7
BAB II	6
2.1. RPJMD 2025-2029..	6
2.2. Rencana Strategis	9
2.3. Perjanjian Kinerja	11
BAB III	12
3.1.Kerangka Pengukuran Kinerja	12
3.2 Evaluasi dan Analisa Pencapaian Kinerja Berdasarkan Sasaran	13
3.3 Realisasi Anggaran	64
BAB IV PENUTUP	69
4.1. Kesimpulan	69
4.2. Saran	69
LAMPIRAN	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dinas Sosial mempunyai tugas penting untuk melaksanakan berbagai prioritas yang tercantum di dalam RPJMD 2025-2029. Tugas berat namun sangat mulia ini harus kita lakukan dengan penuh kesungguhan, kreatif, efektif, efisien dan akuntabel. Untuk itu, diperlukan sinergitas dan koordinasi yang baik dari seluruh bidang agar seluruh sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam berbagai dokumen perencanaan, dapat tercapai secara optimal.

LKjIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Solok tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2025, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Solok pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Solok dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Sosial Kabupaten Solok tahun 2025, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing bidang yang ada dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Solok.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Solok adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Solok.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah

- a. menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Solok.
- b. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Solok.

- c. Sebagai bukti akuntabilitas kepada public atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

1.3 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2023 tentang tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:

1) Tugas Pokok

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas pembantua yang diberikan kepada Daerah.

2) Fungsi

- a) Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang sosial
- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknik di bidang sosial
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial
- e) Pelaksanaan administrasi Dinas
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 33 tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdiri dari:

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat;
- c) Bidang Rehabilitasi Sosial;
- d) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- e) Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dan Bidang dilingkungan Dinas Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, masing-masing membawahi :

- a. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Bidang Rehabilitasi Sosial :
 1. Seksi Rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, pengangkatan anak dan taman anak sejahtera.
 2. Seksi Rehabitasi sosial penyandang disabilitas.
 3. Seksi Rehabitasi Sosial, tuna sosial dan korban nafza dan perdagangan orang.
- c. Bidang Perlindungan dan jaminan sosial:
 1. Seksi Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial
 2. Seksi Perlindungan sosial, kepahlawanan dan keperintisan
 3. Seksi Jaminan sosial keluarga rentan, program keluarga harapan, kartu indonesia sehat, kartu indonesia pintar, kartu keluarga sejahtera.
- d. Bidang pemberdayaan sosial
 1. Seksi bantuan fakir miskin dan bantuan sosial
 2. Seksi Pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan restorasi sosial.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Solok, Dinas Sosial Kabupaten Solok terdiri dari, Kepala Dinas, Sekretaris, Tiga Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional :

1. Sekretariat mempunyai tugas mengelola urusan administrasi umum dan kepegawaian, urusan keuangan dan urusan perencanaan evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program kerja serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan
 - b. Perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja dinas
 - c. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja dinas
 - d. Pengoordinasian penyusunan rencana anggaran dinas
 - e. Penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan
 - f. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Dinas
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas
 - i. Penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan kinerja instansi pemerintah dan laporan rencana aksi reformasi birokrasi serta laporan pertanggungjawabab Dinas
 - j. Pengoordinasian penyusunan laporan keuangan Dinas
 - k. Pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumahtangga, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas subbagian umum mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan kepegawaian
- b. Pengelolaan urusan tata usaha dan kearsipan
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan
- d. Pengelolaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol
- e. Pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan
- f. Penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan rencana pemeliharaan barang unit
- g. Penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyesuaian tuntutan ganti kerugian daerah
- h. Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian umum dan kepegawaian
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan rehabilitasi sosial. Dalam melaksanakan tugas nya bidang rehabilitasi sosial mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis , fasilitasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar dan/ atau lembaga
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas si luar panti dan/ atau lembaga
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial, tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/ atau lembaga
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial, lanjut usia di luar panti dan/ atau lembaga.
 - e. Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immunodeficiency Syndrome*) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi
 - f. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi
 - g. Pelaksanaan norma standar, prosedur, dan kriteria dibidang rehabilitasi sosial
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan perlindungan dan jaminan sosial. Dalam melaksanakan tugas nya bidang perlindungan dan jaminan sosial mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, dan koordinasi serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga
 - d. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan, pemberdayaan sosial. Dalam melaksanakan tugasnya bidang pemberdayaan sosial mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan Masyarakat.

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial.

1.4 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Solok sampai akhir tahun 2025 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 20 (dua puluh) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta 18 orang Tenaga Harian Lepas (data per 31 Desember 2025). Latar belakang pendidikan PNS bervariasi mulai SD hingga Strata Dua (S2). Rekapitulasi pegawai (PNS) berdasarkan pendidikan pada masing-masing Bidang Dinas Sosial Kabupaten Solok disajikan pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Rekapitulasi PNS Dinas Sosial Tahun 2025 Berdasarkan Pendidikan dan Bidang

No	Tingkat Pendidikan	Sekretariat	Bidang Resos	Bidang Linjamsos	Bidang Pemberdayaan Sosial	Total
1	S2	-	2	2	1	5
2	S1	9	3	3	4	19
3	D3	1	-	-	1	2
4	D2	-	-	-	-	-
5	SMA	3	1	3	-	7
6	SLTP	-	-	1	-	1
7	SD	2	-	-	-	2
Jumlah		15	6	9	6	36

Sumber : Kasubag Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

1.5 Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD, Dinas Sosial Kabupaten Solok dilengkapi dengan sarana dan prasarana antara lain adalah :

a. Sarana

Adapun sarana penunjang atau mendukung pelaksanaan tugas fungsi Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
DATA SARANA PENDUKUNG
DINAS SOSIAL TAHUN 2025

No	Jenis Sarana Dan Prasarana	Jumlah	Kondisi			Kondisi Kelengkapan (Lengkap Kurang, Mencukupi Atau Lainnya)
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kursi Pejabat Eselon II	1	1			Mencukupi
2	Kursi Pejabat Eselon III	12	12			Mencukupi
3	Kursi Tamu	6	3	3		Mencukupi
4	Meja Biro/ Meja 1/2 Biro	40	40			Mencukupi
5	Lemari Arsip	12	12			Mencukupi
6	Laptop/ Notebook	18	12		6	Kurang
	Komputer	8	8			Mencukupi
7	Filling Kabinet Besi	5	5			Mencukupi
8	Filling Kabinet Kayu	3	3			Kurang
9	Kursi Rapat	50	50			Mencukupi
10.	Kursi Kerja	28	28			Mencukupi
11.	Kursi Lipat	40	40			Mencukupi
13.	Kamera	2		2		Kurang
15.	Mesin Potong Rumput	2	1	1		Mencukupi
16.	Mesin Penghisap Debu	1	1			Mencukupi
17.	Karpet	3	3			Mencukupi
18.	Mesin Tik	2	2			Mencukupi
19.	Kursi Besi Panjang	2	2			Mencukupi
20.	Televisi	3	2		1	Mencukupi
21.	Power Supply (Speaker Aktif)	2	2			Mencukupi
22.	Printer	12	10	2		Mencukupi

b. Prasarana

Tanah

- Tanah Makam Pahlawan seluas 27.000 M², Tahun pengadaan 2005, yang terletak di Aro Suka.

Gedung

- Bangunan Gedung Kantor Permanen terletak di Arosuka

1.6 Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas fungsinya dan Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Solok didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 5.863.438.212,00,-** (Lima miliar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua belas rupiah). Realisasi keuangan Dinas Sosial sebesar **Rp. 5.537.485.249,-** (Lima miliar lima ratus tiga

puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) atau sebesar 94, 44%.

Adapun isu-isu yang berkembang pada saat ini yang berhubungan dengan tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Solok dan melihat kepada Isu-isu strategis bidang sosial antara lain adalah :

1. Belum optimalnya peran Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam upaya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2. Belum optimalnya validasi data masyarakat yang masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)
3. Belum semua program pengentasan kemiskinan menggunakan data DTSEN sebagai basis data
4. Belum efektifnya kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
5. Masalah rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, ODGJ terlantar, Anak terlantar yang menggelandang yang mangancam dirinya atau orang lain.
6. Belum optimalnya penanganan masyarakat terdampak bencana mulai dari mitigasi bencana sampai penanganan rehabilitasi pasca bencana.

1.7 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025. Capaian Kinerja (*Performance results*) Tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2025 berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sebagai berikut :

BAB I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, Maksud dan Tujuan, Struktur Organisasi dan Sistematika Penyajian;

BAB II –Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program kegiatan dan anggaran Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2025 meliputi RPJMD 2021-2026, Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 dan Penetapan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2025.

BAB III- Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Solok dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2025.

BAB IV -Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2025 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RPJMD 2025-2029

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Sosial berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029.

RPJMD Tahun 2025-2029 secara umum bertujuan untuk memberikan arah dan tuntunan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Secara khusus, RPJMD ini bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman kepada unit kerja dan perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis dan rencana kerja.

Dinas Sosial merupakan salah satu satuan perangkat pemerintah daerah yang menjalankan tugas pokok urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, terdapat beberapa agenda prioritas dan sasaran dalam RPJMD 2025-2029 yang harus dilaksanakan. Agenda prioritas, arah kebijakan dan sasaran disajikan pada Tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1. Sasaran, Indikator Sasaran dan Arah Kebijakan Dinas Sosial dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029

Sasaran	Indikator Sasaran	Arah kebijakan
3	4	
Misi 2 Meningkatnya Kemandirian Ekonomi dan Perlindungan Sosial yang Adaptif	1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	1. Verifikasi dan Validasi Data Kepesertaan JKN 2. Verifikasi dan Validasi data penerima program perlindungan sosial 3. Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Penerima Manfaat 4. Meningkatkan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Penerima Manfaat 5. Akurasi Integrasi dan Pemutakhiran Data Secara Berkala
	2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	

Sumber : RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025 – 2029 urusan sosial

2.2 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Solok tahun 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Solok yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Dinas Sosial Kabupaten Solok beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Solok telah mengacu kepada RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, khususnya terkait dengan 1 misi yaitu misi 2 (Meningkatnya Kemandirian Ekonomi dan Perlindungan Sosial yang Adaptif).

Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki peran penting dalam penyusunan RPJMD. Selaras dengan penerapan paradigma penganggaran berbasis kinerja, maka perencanaan pembangunan daerah prinsip yang sama. Berikut ini adalah tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok.

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (2025 – 2029)
Dinas Sosial Kabupaten Solok

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja sasaran pada tahun ke-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	4	6	5	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi dan Perlindungan Sosial yang Adaptifa		Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rupiah	11.152.000	11.322.000	11.498	11.679.000	11.867.000	12.062.000
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai)	Nilai	70,10	72,08	74,06	76,05	78,03	80,01
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	Indeks	57,06	57,36	57,76	58,16	58,56	58,86
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	76,11	76,47	76,83	77,19	77,56	77,92

Sumber: RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 Bidang Sosial

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Dinas Sosial kabupaten Solok disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Solok tahun 2025 secara lengkap dapat dilihat sebagai berikut :

TABEL 2.3
PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	57,36
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	76,47

Sumber : RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 Bidang Sosial

Tabel 2.4
PROGRAM DAN ANGGARAN DINAS SOSIAL TAHUN 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	3.394.749.773,97,-
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp.	57.288.561,00,-
3.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp.	1.300.378.953,00,-
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.	512.207.721,03,-
5.	Program Penanganan Bencana		530.739.953,00,-
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp.	68.073.250,00,-
JUMLAH		Rp.	5.863.438.212,00,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Dalam pelaksanaan penyusunan akuntabilitas kinerja diperlukan suatu kerangka pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran, atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan terdiri dari input, output, outcome, benefit dan impact.

Media pengukuran kinerja terdiri dari penetapan kinerja dan pengukuran kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai pengukuran kinerja berikut:

Tabel 3.1. Skala Pengukuran Ordinal Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	85% ->100%	Sangat Baik
2.	70% - <85%	Baik
3.	55% - <70%	Sedang
4.	<55%	Kurang Baik

Sumber: Modul 4 Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3.2. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Berdasarkan Sasaran.

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Evaluasi dapat diartikan secara luas ataupun secara sempit. Hal ini dapat dilihat dari siapa yang melakukan evaluasi.

Evaluasi secara menyeluruh antara lain mencakup penilaian terhadap apa yang dilaporkan dan dihasilkan, dan penilaian atas pencapaian hasil; penilaian atas aktivitas, program, kebijakan dan keselarasan dengan misi dan visi organisasi; penilaian atas akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan; penilaian atas pelaksanaan tugas; penilaian kinerja pegawai; penilaian kinerja pengawas; pelanggan, dan pihak ketiga lainnya. Evaluasi menyeluruh ini pada umumnya dilakukan oleh evaluator eksternal. Di samping itu, evaluasi juga dapat dilakukan oleh pihak internal organisasi yang mencakup penilaian atas apa yang telah dicapai organisasi, menghitung nilai capaian dari pelaksanaan kegiatan, dan menghitung nilai capaian kinerja kegiatan tersebut. Evaluasi kinerja yang dimaksud di sini adalah evaluasi yang dilakukan oleh evaluator internal yaitu pihak yang membuat LKjIP itu sendiri.

Tujuan dilakukannya evaluasi kinerja adalah agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

3.2.1. Capaian Indikator Kinerja.

Berdasarkan rencana strategis dinas dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2021-2026, untuk Dinas Sosial ditetapkan 2 sasaran dan dijabarkan dalam 2 indikator sasaran sebagai tolok ukur untuk pencapaian kinerja.

Hasil capaian terhadap 2 sasaran pada Tahun 2025 terdapat 2 indikator kinerja yang memiliki capaian 100%. Adapun ringkasan capaian indikator kinerja sebagai berikut ini:

Tabel 3.2. Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2025

No	Tingkat Capaian	Jumlah Indikator Kinerja	Persentase
1.	85% - >100%	3	100%
2.	70% - <85%	-	-
3.	55% - <70%	-	-
4.	<55%	-	-
	Total	3	100%

Secara rinci, realisasi serta capaian untuk masing-masing indikator kinerja disajikan pada tabel 3.3. berikut ini.

Tabel 3.3. Rincian Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	indeks	57,06	55,53	97,31%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	Angka	76,11	75,15	98,73%

3.2.2. Analisis Capaian Kinerja.

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, pada masing-masing indikator kinerja. Selain itu, analisis dilakukan dengan mengaitkan hasil capaian tahun-tahun sebelumnya serta kemungkinan tercapainya sasaran Renstra (Rencana Strategis) pada akhir tahun pencapaian pada Tahun 2025.

Analisis terhadap 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Solok sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada akhir masa Renstra, disajikan sebagai berikut:

Sasaran 1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif

1. Indikator Indeks Kesejahteraan Sosial

a. Definisi Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS)

Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan sosial masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, kerentanan sosial, dan kemampuan masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial. Nilai IKS dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI untuk setiap Tahunnya pada akhir tahun, IKESOS merupakan indikator baru/pertama pada penyusunan IKU Dinas Sosial se Indonesia.

Tabel 3. 4
IKU Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS)

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	57,06.	55.53	97,31%

Dalam penentuan Target Nilai IKESOS pada awal tahun penyusunan Renstra telah ditetapkan melalui skoring oleh Kementerian Sosial RI untuk Kabupaten Solok sebesar 57, 06 dan pada awal tahun pencapaian nilai

IKESOS pada Tahun akhir 2025 sebesar 55,53 dan dengan capaian 97,31% penetapan nilai IKESOS 55,53 berada pada Kategori Maju.

Banyak aspek yang mempengaruhi dalam penentuan nilai IKESOS Kabupaten Solok dengan beberapa unsur terkait

b. Rumus Perhitungan IKESOS

IKESOS biasanya dibangun dari beberapa dimensi dan indikator, misalnya:

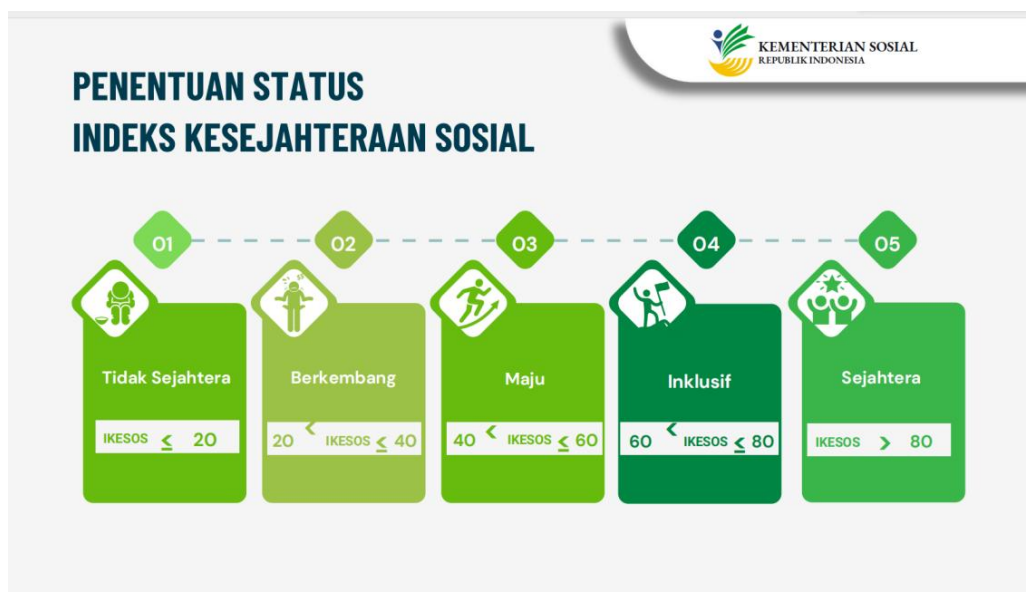
1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
 - λ Akses pangan
 - λ Akses kesehatan
 - λ Akses pendidikan
 - λ Perumahan layak
2. Pekerjaan dan Jaminan Sosial
 - λ Tingkat pengangguran
 - λ Akses terhadap jaminan sosial dan bantuan sosial
3. Lingkungan dan Kehidupan Sosial
 - λ Tingkat kriminalitas/keamanan
 - λ Partisipasi sosial
 - λ Akses terhadap fasilitas umum
4. Kerentanan dan Perlindungan Sosial
 - λ Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
 - λ Perlindungan terhadap anak, lansia, dan penyandang disabilitas
 - λ

c. Penentuan Nilai Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS)

Nilai Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) dibagi dalam 5 kategori yaitu:

1. Kategori Tidak Sejahtera (Berada pada rentang nilai kurang dari 20)
2. Kategori berkembang (berada pada rentang nilai 20- 40)
3. Kategori maju (berada pada rentang nilai 40-60)
4. Kategori Inklusif (berada pada rentang nilai 60- 80)
5. Kategori sejahtera (berada pada rentang nilai lebih dari 80).

Dan untuk Dinas Sosial berada pada kategori Maju dengan nilai 55,53.



d. Interpretasi Nilai Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS)

- Nilai IKS tinggi → menunjukkan masyarakat telah terpenuhi kebutuhan dasar, terlindungi dari risiko sosial, serta memiliki tingkat partisipasi sosial yang baik.
- Nilai IKS rendah → menandakan masih tingginya angka kemiskinan, kerentanan sosial, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar dan perlindungan sosial.

e. Penetapan Nilai Indeks Kesejahteraan Sosial

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERISOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR:
TENTANG
PENETAPAN NILAI INDEKS
KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN
2025

A. NILAI INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI

NO	PROVINSI	IKESOS UMUM PROVINSI	IKESOS LANSIA PROVINSI	IKESOS DISABILITAS PROVINSI
1	Aceh	50,38	52,84	55,14
2	Sumatera Utara	49,79	48,87	49,53
3	Sumatera Barat	50,05	48,93	49,12
4	Riau	47,86	49,95	50,71
5	Jambi	49,28	49,06	49,14
6	Sumatera Selatan	54,49	52,57	53,66
7	Bengkulu	45,77	46,09	48,40
8	Lampung	57,72	53,92	54,79
9	Kepulauan Bangka Belitung	57,55	54,78	55,52
10	Kepulauan Riau	48,65	47,77	50,53
11	Daerah Khusus Ibukota	49,16	52,25	53,42

E. NILAI INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA

NO	Provinsi	KAB/KOTA	IKESOS UMUM KAB/KOTA	IKESOS LANSIA KAB/KOTA	IKESOS DISABILITAS KAB/KOTA
1	Provinsi Bali	Kabupaten Badung	52,62	54,45	53,64
2	Provinsi Bali	Kabupaten Bangli	55,69	54,48	57,55
3	Provinsi Bali	Kabupaten Buleleng	56,67	54,31	57,09
4	Provinsi Bali	Kabupaten Gianyar	54,55	50,59	55,21
5	Provinsi Bali	Kabupaten Jembrana	60,08	59,48	58,57
6	Provinsi Bali	Kabupaten Karangasem	53,61	50,30	53,63
7	Provinsi Bali	Kabupaten Klungkung	53,03	52,03	54,50
8	Provinsi Bali	Kabupaten Tabanan	59,20	65,49	58,18
9	Provinsi Bali	Kota Denpasar	49,73	50,60	54,76
10	Provinsi Bangka Belitung	Kabupaten Bangka	62,60	58,66	60,49
11	Provinsi Bangka Belitung	Kabupaten Bangka Barat	52,71	52,81	53,16
12	Provinsi Bangka Belitung	Kabupaten Bangka Selatan	52,88	51,52	50,37
13	Provinsi Bangka Belitung	Kabupaten Bangka Tengah	64,00	58,73	57,68
14	Provinsi Bangka Belitung	Kabupaten Belitung	58,01	51,82	57,54
15	Provinsi Bangka Belitung	Kabupaten Belitung Timur	51,88	49,55	49,41
16	Provinsi Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang	56,71	50,65	54,80
17	Provinsi Banten	Kabupaten Lebak	57,56	49,40	49,98
18	Provinsi Banten	Kabupaten Pandeglang	53,33	51,63	49,30
19	Provinsi Banten	Kabupaten Serang	58,39	52,55	50,30
20	Provinsi Banten	Kabupaten Tangerang	58,76	59,04	58,51
21	Provinsi Banten	Kota Cilegon	57,69	53,95	55,42
22	Provinsi Banten	Kota Serang	53,19	54,67	52,97
23	Provinsi Banten	Kota Tangerang	51,84	50,41	49,72

452	Provinsi Sumatra Barat	Kabupaten Pasaman Barat	41,17	40,63	40,67
453	Provinsi Sumatra Barat	Kabupaten Pesisir Selatan	49,78	183,61%	Exit Full Screen
454	Provinsi Sumatra Barat	Kabupaten Sijunjung	55,92	54,58	51,47
455	Provinsi Sumatra Barat	Kabupaten Solok	55,53	54,32	55,44
456	Provinsi Sumatra Barat	Kabupaten Solok Selatan	41,27	41,35	43,09
457	Provinsi Sumatra Barat	Kabupaten Tanah Datar	43,13	42,23	42,14
458	Provinsi Sumatra Barat	Kota Bukittinggi	45,13	43,96	44,54
459	Provinsi Sumatra Barat	Kota Padang	51,32	45,73	46,61
460	Provinsi Sumatra Barat	Kota Padang Panjang	46,12	44,93	43,48
461	Provinsi Sumatra Barat	Kota Pariaman	53,24	55,41	50,75
462	Provinsi Sumatra Barat	Kota Payakumbuh	50,76	52,36	49,58
463	Provinsi Sumatra Barat	Kota Sawahlunto	67,35	59,30	61,83
464	Provinsi Sumatra Barat	Kota Solok	48,52	50,02	47,20
465	Provinsi Sumatra Selatan	Kabupaten Banyuasin	52,95	52,27	54,09
466	Provinsi Sumatra Selatan	Kabupaten Empat Lawang	50,56	48,48	55,44
467	Provinsi Sumatra Selatan	Kabupaten Lahat	46,19	47,68	46,95
468	Provinsi Sumatra Selatan	Kabupaten Muara Enim	55,05	54,60	53,24
469	Provinsi Sumatra Selatan	Kabupaten Musi Banyuasin	59,57	56,45	55,84
470	Provinsi Sumatra Selatan	Kabupaten Musi Rawas	59,80	63,94	62,31
471	Provinsi Sumatra Selatan	Kabupaten Musi Rawas Utara	52,70	50,66	52,44
472	Provinsi Sumatra Selatan	Kabupaten Ogan Ilir	60,59	66,53	52,91
473	Provinsi Sumatra Selatan	Kabupaten Ogan Komering Ilir	59,04	50,31	60,45
474	Provinsi Sumatra Selatan	Kabupaten Ogan Komering Ulu	52,35	48,89	51,95
475	Provinsi Sumatra Selatan	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	47,41	47,33	51,56

F. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja

Tabel 3.5
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja

No	Program dan Kegiatan		Alokasi dan Realisasi Anggaran			
			Sumber Dana	Jumlah	Realisasi Keuangan	%
1	2		6	7	8	9
A	Program Pemberdayaan Sosial		APBD	57.288.561	52.152.634	91,03
I	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota			57.288.561	52.152.634	91,03
1.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota			57.288.561	52.152.634	91,03
B	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			1.300.378.953	1.227.031.320	94,36
II	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			924.824.426	861.032.762	94,62
2	Penyediaan Permakanan			736.898.653	697.265.333	94,62
3	Penyediaan Alat Bantu			176.795.773	152.856.535	86,46

	4	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		11.130.000	10.910.894	98,03
	III	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Korban HIV/ AIDS dan NAPZA si Luar Panti Sosial		375.554.527	365.998.558	97,46
	5	Pemberian Layanan Kedaruratan		284.768.035	279.416.658	97,46
	6	Pemberian Bimbingan Fisik Mental, Spiritual, dan Sosial		73.338.394	70.631.506	96,31
	7	Pemberian Layanan Rujukan		17.448.098	15.950.394	91,42
C		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		512.207.721,03	492.969.455	96,24
	IV	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		512.207.721,03	492.969.455	96,24
	8	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		48.188.304	46.847.157	97,22
	9	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		139.621.941,03	133.715.684	95,77
	10	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		324.397.476	312.406.614	96,30
D		Program Penanganan Bencana	APBD	530.739.953	486.803.597	91,72
	V	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota		487.476.776	449.674.389	92,25
	11	Penyediaan Makanan		487.476.776	449.674.389	92,25
	VI	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota		43.263.177	37.129.208	85,82
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		43.263.177	37.129.208	85,82
E		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	APBD	68.073.250	63.967.368	93,37
	VII	Pemeliharaan Taman Makam Pahlwan Nasional Kabupaten/ Kota		68.073.250	63.967.368	93,37
	1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota		68.073.250	63.967.368	93,37
			Jumlah	2.468.688.438,03	2.332.924.104,00	94,09

Sasaran 2. :Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

1. Nilai Sakip Perangkat Daerah

Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah diukur dengan satu indikator yaitu nilai SAKIP Perangkat Daerah. Pengukuran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada level Perangkat Daerah (PD) bertujuan untuk memastikan bahwa setiap unit kerja tidak hanya menghabiskan anggaran, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata yang terukur. Secara garis besar, pengukuran ini dilakukan oleh Inspektorat selaku Tim Evaluasi Internal berdasarkan pedoman dari KemenPAN-RB.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sebagai bentuk wujud transparansi dan akuntabilitas publik yang nyata, bagian ini menyajikan analisis komperhensif mengenai capaian kinerja pada indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah sepanjang tahun berjalan. Pengukuran ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif tahunan, melainkan dipandang sebagai instrumen evaluasi strategis untuk mengukur sejauh mana efektivitas program kerja dan efisiensi penggunaan anggaran telah selaras dalam mencapai visi dan misi organisasi. Melalui perbandingan antara target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi faktual di lapangan, organisasi dapat memotret kualitas implementasi manajemen kinerja secara utuh mulai dari perencanaan yang terukur, pengukuran yang akurat, hingga pelaporan yang akuntabel.

Implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Solok pada tahun ini difokuskan pada penguatan budaya kinerja dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result-oriented government*). Proses evaluasi yang dilakukan mencakup penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya bagi masyarakat.

Berdasarkan parameter tersebut, hasil capaian kinerja untuk indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah secara rinci dapat dicermati pada Tabel 3.16 berikut ini.

Tabel 3.6

IKU Nilai Sakip Perangkat Daerah

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	76.11	75.15	98,73%

Sumber: Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025, LHE AKIP

Capaian indikator Nilai SAKIP yang menyentuh angka 98,73% dengan realisasi nilai sebesar 75,15 ini merupakan bukti nyata dari soliditas dan sinergitas seluruh lini di lingkup Dinas Sosial dalam mengimplementasikan manajemen kinerja yang akuntabel dan transparan. Perolehan nilai tersebut menempatkan Dinas Sosial pada Kategori BB (Sangat Baik), yang menegaskan bahwa organisasi telah memiliki sistem manajemen kinerja yang sangat andal, didukung oleh efisiensi penggunaan anggaran yang selaras dengan perencanaan strategis daerah. Predikat ini bukan sekadar pencapaian

administratif, melainkan cerminan dari budaya kerja berorientasi hasil yang telah terinternalisasi dengan baik di setiap bidang.

Meskipun target yang ditetapkan belum terlampaui sepenuhnya secara absolut, hasil ini menjadi fondasi yang sangat kuat bagi kami untuk terus melakukan akselerasi perbaikan pada berbagai aspek yang masih memiliki ruang pengembangan, terutama dalam penguatan sistem pengukuran kinerja yang lebih real-time dan berkualitas. Dinas Sosial berkomitmen untuk menjadikan hasil evaluasi tahun ini sebagai katalisator dalam meningkatkan efektivitas program pada tahun mendatang. Dengan semangat perbaikan berkelanjutan, kami optimis dapat mempertahankan serta meningkatkan kualitas akuntabilitas ini demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin kredibel, akurat, dan memberikan dampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu (kondisi awal)

Perkembangan capaian indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.7

Tabel 3.7
Perkembangan IKU Nilai Sakip Perangkat Daerah

No	IKU	Sat	Kondisi Awal (2024)	Target Perjanjian Kinerja		Realisasi		Capaian		Target Akhir RPJMD/ Renstra	Capaian Akhir RPJMD/ Renstra
				2024	2025	2024	2025	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5	10=8/6	11	12=8/11
1	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	69,75	-	76.11	-	75.15	-	98,73%	77.92	96.44%

Sumber: Perjanjian Kinerja Bapelitbang Tahun 2025, Diolah 2026

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Sosial pada periode ini menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan terukur. Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah berhasil mencatatkan realisasi sebesar 75,15 dari target Perjanjian Kinerja tahun berjalan sebesar 76,11. Dengan tingkat capaian kinerja tahunan sebesar 98,73%, Dinas Sosial secara konsisten mengukuhkan posisinya pada Kategori BB (Sangat Baik). Hasil ini merupakan perwujudan dari soliditas seluruh lini organisasi dalam mengimplementasikan manajemen kinerja yang akuntabel, di mana setiap program kerja telah disinergikan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran.

Jika ditinjau secara historis terhadap Kondisi Awal (Tahun 2024) yang berada pada angka 69,75, terdapat kenaikan signifikan sebesar 5,4 poin. Lonjakan kualitas ini mencerminkan keberhasilan langkah-langkah perbaikan berkelanjutan yang dilakukan Dinas Sosial, mulai dari sinkronisasi perencanaan hingga penguatan sistem pelaporan yang lebih transparan. Kenaikan nilai ini juga menandakan bahwa budaya kerja berorientasi hasil telah terinternalisasi dengan baik, melampaui standar administratif menuju tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan kredibel.

Lebih jauh lagi, apabila realisasi saat ini dikomparasikan dengan Target Akhir RPJMD/Renstra sebesar 77,92, maka progres capaian strategis Bapelitbang telah menyentuh angka 96,44%. Angka ini memberikan sinyal optimisme yang kuat bahwa target akhir periode perencanaan akan dapat tercapai secara paripurna sebelum masa Renstra berakhir. Meskipun terdapat selisih (2,29) dari target tahunan, hal ini tidak mengurangi kualitas performa organisasi secara keseluruhan, melainkan menjadi titik evaluasi untuk melakukan akselerasi pada aspek-aspek yang masih memiliki ruang pengembangan.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota

Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah merupakan tolok ukur formal yang standarnya ditetapkan secara nasional oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021. Standar ini berlaku seragam di seluruh tingkatan pemerintahan, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sebagai parameter akuntabilitas dan efisiensi birokrasi.

Berdasarkan standar tersebut, realisasi Nilai SAKIP Bapelitbang sebesar 75,75 menempatkan organisasi pada predikat Kategori BB (Sangat Baik). Secara nasional, kategori ini merepresentasikan instansi pemerintah yang memiliki sistem manajemen kinerja yang sangat andal, perencanaan yang selaras, serta penggunaan anggaran yang sudah menunjukkan tingkat efisiensi tinggi terhadap pencapaian hasil.

Jika dikomparasikan dengan standar dan target yang berlaku, posisi capaian Bapelitbang dapat dianalisis sebagai berikut:

Tabel 3.8

Perbandingan Nilai Sakip Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat dan Rata-rata Nasional

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kabupaten Solok	Sumatera Barat	Rata-rata Kab/Kota
1.	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	68,74	78,85	64,89

Sumber: KemenpanRB 2025

Berdasarkan data pada Tabel 3.8, terlihat posisi capaian kinerja Nilai Sakip Perangkat Daerah Dinas Sosial yang sangat kompetitif dan berada di atas rata-rata nasional. Realisasi Nilai SAKIP Dinas Sosial yang mencapai 75,15 secara signifikan telah melampaui rata-rata Kabupaten/Kota secara nasional yang berada pada angka 64,89, serta berada di atas capaian nilai Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Solok secara keseluruhan yaitu 68,74.

Meskipun nilai Dinas Sosial saat ini masih berada sedikit di bawah nilai Akuntabilitas kinerja Provinsi Sumatera Barat yang telah menyentuh angka 78,85, namun tren pencapaian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Solok telah menjadi salah satu motor penggerak akuntabilitas di daerah. Keberhasilan menembus angka di atas rata-rata nasional dan kabupaten membuktikan bahwa sistem manajemen kinerja di Dinas Sosial sudah berjalan pada jalur yang benar dan memiliki standar kualitas yang melampaui ekspektasi rata-rata instansi sejenis di tingkat lokal maupun nasional.

Kondisi ini memberikan penegasan bahwa Dinas Sosial memiliki kredibilitas yang kuat dalam mengelola perencanaan dan anggaran yang berorientasi hasil. Posisi yang berada di atas rata-rata nasional ini harus dijadikan motivasi untuk terus melakukan akselerasi perbaikan, khususnya dalam mengejar standar capaian Provinsi Sumatera Barat, guna memastikan tata kelola pemerintahan di Dinas Sosial tidak hanya unggul di tingkat kabupaten, tetapi juga mampu bersaing di tingkat regional dan nasional.

4. Analisa penyebab keberhasilan kinerja

Capaian nilai 75,15 (BB) merupakan lompatan signifikan dari kondisi awal 69,75. Keberhasilan ini didorong oleh beberapa faktor kunci:

- Adanya keterlibatan aktif Kepala Dinas dalam setiap tahapan reviu berjenjang, mulai dari penyusunan pohon kinerja (cascading) hingga monitoring capaian secara berkala;
- Dinas Sosial telah berhasil melakukan penyelarasan target antara dokumen Renstra, Perjanjian Kinerja (PK), hingga sasaran kinerja pegawai. Hal ini memastikan setiap sub-kegiatan berkontribusi langsung pada pencapaian indikator utama;
- Penggunaan aplikasi silakip yang lebih disiplin dalam penginputan data capaian kinerja secara triwulanan;
- Terjalin komunikasi yang efektif dengan Tim evaluasi internal (Inspektorat/Tim SAKIP PD), sehingga dokumen pendukung (evidence) yang diperlukan untuk setiap indikator penilaian terkumpul dengan lengkap dan valid.

Meskipun mencapai 98,73%, terdapat deviasi sebesar 2,29% dari target 76,11. Analisis terhadap selisih ini mengidentifikasi beberapa tantangan:

- Terdapat beberapa sub-kegiatan yang mencapai target fisik 100%, namun serapan anggarannya masih menyisakan sisa lebih yang cukup besar tanpa penjelasan efisiensi yang detail. Evaluator SAKIP menilai hal ini sebagai ketidakakuratan perencanaan anggaran.
- Masih terdapat beberapa rekomendasi dari hasil evaluasi tahun sebelumnya yang pelaksanaannya sudah dilakukan, namun pendokumentasian bukti tindak lanjutnya belum terstruktur dengan sempurna sesuai standar KemenPAN-RB;

5. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pencapaian Nilai SAKIP sebesar 75,15 (Kategori BB) dengan tingkat capaian 98,73% menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang sangat memuaskan di lingkungan Dinas Sosial. Efisiensi ini diukur melalui korelasi antara penyerapan anggaran dengan output kinerja yang dihasilkan, di mana organisasi mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai target strategis secara maksimal.

Adapun rincian analisis efisiensi sumber daya Dinas Sosial tahun ini adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Capaian kinerja yang hampir menyentuh 100% dengan kondisi keterbatasan personil menunjukkan peningkatan produktivitas kerja.

Bapelitbang telah menerapkan strategi multi-tasking dan penguatan koordinasi lintas bidang, sehingga proses pengumpulan bukti kinerja (evidence) dan pelaporan SAKIP tidak lagi membebani satu unit kerja saja, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif yang terintegrasi.

2. Efisiensi Belanja Operasional (Anggaran)

Analisis efisiensi merupakan instrumen krusial dalam mengukur sejauh mana Bapelitbang mampu mentransformasikan sumber daya finansial menjadi hasil kinerja yang nyata. Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Sosial didukung oleh alokasi anggaran APBD sebesar Rp **5.863.438.212,00,-** (Lima miliar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua belas rupiah). Dari total pagu tersebut, porsi utama dialokasikan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp **3.394.749.773,97,-** (Tiga Miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma sembilan puluh tujuh rupiah).

Pagu anggaran pada program penunjang ini didistribusikan secara strategis ke dalam 6 (enam) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan yang dirancang untuk memperkuat tata kelola internal dan pelayanan publik. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi keuangan tercatat sebesar Rp **3.214.560.875,-** atau setara dengan 96,41%. Kondisi ini mencerminkan adanya efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp180.188.898,97,- (5,30%).

Penting untuk ditegaskan bahwa efisiensi ini merupakan hasil dari manajemen belanja yang disiplin dan selektif, bukan akibat dari adanya program yang tidak terlaksana. Efisiensi tersebut secara signifikan bersumber dari penghematan pada beberapa komponen belanja utama, antara lain Optimalisasi Belanja Pegawai, Pengetatan pada belanja barang pakai habis, belanja jasa kantor, serta belanja perjalanan dinas yang dilakukan secara selektif dengan memprioritaskan urgensi dan manfaat langsung terhadap sasaran kinerja dan Melalui proses pengadaan yang transparan dan kompetitif sehingga diperoleh harga perolehan aset yang lebih ekonomis tanpa mengurangi spesifikasi teknis yang dibutuhkan.

Keberhasilan manajemen sumber daya ini tecermin secara nyata melalui Tingkat Efektivitas Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Dengan membandingkan persentase capaian kinerja (98,73%) terhadap persentase capaian keuangan (96,41%), diperoleh angka efektivitas sebesar 102,40%. Hasil di atas 100% ini menjadi indikator kuat bahwa Dinas Sosial telah mencapai tingkat produktivitas yang luar biasa; mampu menghasilkan output dan outcome kinerja yang hampir sempurna meskipun dengan penyerapan sumber daya yang lebih hemat.

Tingkat efektifitas dan efisiensi nilai sakip perangkat daerah dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi IKU
Nilai Sakip Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target PK	Realisasi	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	76.11	75.15	98,73%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.394.749.773,97	3.214.560.875,00	96,41%
		RATA-RATA CAPAIAN				98,73%	TOTAL PER SASARAN	3.394.749.773,97	3.214.560.875,00	96,41%
TINGKAT EFISIENSI = 100% - 96,41% = 3,59%										
TINGKAT EFEKTIFITAS = $\frac{98,73\%}{96,41\%} \times 100\% = 102,40\%$										

Sumber : Dinas Sosial, Diolah 2026

6. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja

Pencapaian target kinerja pada indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah tidak terlepas dari peran strategis fungsi kesekretariatan sebagai unit pendukung utama organisasi. Sekretariat memegang tanggung jawab sentral dalam mengintegrasikan seluruh elemen manajemen kinerja mulai dari perencanaan dokumen strategis, pengelolaan tata usaha, manajemen kepegawaian, hingga penatausahaan keuangan yang akuntabel.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh sekretariat merupakan motor penggerak terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di internal Dinas Sosial Melalui dukungan program penunjang rutin, Dinas Sosial mampu memastikan bahwa setiap proses bisnis organisasi berjalan sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan. Hal ini mencakup ketersediaan data kinerja yang valid, ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan, serta pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang mendukung produktivitas aparatur. Efektivitas koordinasi yang dijalankan oleh sekretariat terbukti mampu menyelaraskan target-target kinerja di setiap bidang dengan tujuan strategis organisasi. Dengan ketersediaan sumber daya yang dikelola secara efisien, sekretariat berhasil memfasilitasi pelaksanaan evaluasi internal secara berkala, yang menjadi faktor kunci dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Dinas Sosial.

Secara lebih terperinci, dukungan alokasi anggaran yang mencakup pagu dan realisasi pada program, kegiatan, serta sub-kegiatan rutin yang menunjang keberhasilan pencapaian Nilai SAKIP tersebut dijabarkan pada Tabel 3.xx berikut:

Tabel 3.10

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung IKU

Nilai Sakip Perangkat Daerah

N o	Program dan Kegiatan		Alokasi dan Realisasi Anggaran			
			Sumb er Dana	Jumlah	Realisasi Keuangan	%
1	2		6	7	8	9
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		APBD	3.394.749.773,97	3.214.560.875	96,41
	I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		114.734.384	107.826.532	94,69
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		59.510.599	45.879.552	77,09
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan		62.575.382	59.701.087	95,41

		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
	II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.591.703.588,04	2.465.749.165	95,14
	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.591.703.588,04	2.465.749.165	95,14
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		116.806.000	109.643.834	93,87
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		116.806.000	109.643.834	93,87
	III	Administrasi Umum Perangkat Daerah		442.112.921,93	421.618.792	95,36
	4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		15.788.075	15.098.015	95,63
	5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		69.676.178	65.650.450	94,22
	6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		65.088.319	58.895.680	90,49
	7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		25.377.492	21.482.017	86,45
	8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		266.182.857,93	260.492.630	97,86
	IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	APBD	24.132.497	23.841.000	98,79
	9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.499.575	1.490.000	99,36
	10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		22.632.922	22.351.000	98,75
	V	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	APBD	97.908.786	88.127.445	90,01
	11	Koordinasi Kepegawaian Perangkat Daerah		97.908.786	88.127.445	90,01

		Jumlah	3.394.749.773,97	3.214.560.875	96,41
--	--	---------------	-------------------------	----------------------	--------------

Sumber : Laporan Fisik dan Keuangan Desember Tahun 2025

Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara keseluruhan sangat mendukung pencapaian indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah.

7. Rencana tindak lanjut perbaikan

Nilai SAKIP Perangkat Daerah merupakan indikator strategis yang memotret kualitas seluruh sistem manajemen kinerja di dalam organisasi, mulai dari aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi internal. Meskipun saat ini Bapelitbang telah mencapai Kategori BB (Sangat Baik) dengan nilai 75,15, organisasi tetap berkomitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan guna mencapai nilai maksimal dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkelas dunia.

Sebagai langkah konkret untuk meningkatkan nilai indikator ini di masa mendatang, Dinas Sosial akan memprioritaskan transformasi digital melalui berbagai inovasi pelayanan internal. Rencana strategis tersebut meliputi:

- Optimalisasi perencanaan dengan melakukan cascading kinerja hingga ke level individu secara real-time. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap aktivitas pegawai selaras dengan pencapaian target strategis organisasi dan memudahkan pemantauan capaian kinerja secara periodik (triwulanan);
- Mengimplementasikan sistem tata kelola administrasi perkantoran berbasis aplikasi untuk meningkatkan kecepatan distribusi informasi, koordinasi antarbidang, serta akurasi pendataan rekam jejak kinerja pegawai;
- Melakukan monitoring anggaran yang terintegrasi dengan capaian fisik (kinerja), sehingga setiap sen anggaran yang terserap dapat dipertanggungjawabkan outputnya secara transparan.

Melalui serangkaian inovasi dan perbaikan sistem ini, Bapelitbang optimis dapat menutup celah yang masih ada, meningkatkan poin pada setiap komponen penilaian SAKIP, dan pada akhirnya mampu mengakselerasi pencapaian target akhir Renstra dengan predikat yang lebih tinggi.

3.2.3. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra 2021-2026

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, pada masing-masing indikator kinerja. Selain itu, analisis dilakukan dengan mengaitkan hasil capaian tahun-tahun sebelumnya serta kemungkinan tercapainya sasaran Renstra (Rencana Strategis) pada akhir tahun pencapaian pada Tahun 2025.

Analisis terhadap 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Solok sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada akhir masa Renstra, disajikan sebagai berikut:

Sasaran 1. Meningkatnya Pelayanannya Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kepada Masyarakat dan Korban Bencana Alam/ Sosial

1. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. IKM diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif.

Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Sosial tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya, pencapaian ini merupakan prestasi bagi Dinas Sosial yang merupakan salah satu Dinas yang memberikan pelayanan publik dan Dinas sosial mendapat nilai sangat baik dari Ombudsman maupun penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang juga mendapat penghargaan pelayanan publik dengan predikat sangat baik.

A. Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

B.

Tabel 3.11 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kepada Masyarakat dan Korban Bencana Alam/ Sosial	1.1 Indeks kepuasan masyarakat	indeks	3.60	3.63	100,83 %

Berdasarkan tabel 3.4 diatas dapat dijelaskan bahwa indikator Indeks Kepuasan masyarakat yang pada Tahun 2026 dengan Terget 3,60 dan realisasi 3,63 dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 100,83%. Dibandingkan dengan Tahun lalu capaian indeks Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan sebesar 0, 27%. Pada Tahun 2024 dengan realisasi capaian sebesar 100,56 % dan Tahun 2025 meningkat menjadi 100,83 %.

C. Perbandingan antara target, realisasi kinerja dan Capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra

Tabel 3.12
Capaian Indikator indeks kepuasan masyarakat

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian (%)		Tahun 2026 (Target akhir Renstra)	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	Target	% capaian
1	Indeks kepuasan masyarakat	3.55	3.60	3.57	3.63	100,56	100,83	3.65	99,45

Berdasarkan tabel 3.5 dapat dilihat bahwa realisasi indeks kepuasan masyarakat tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan, dan untuk capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 0,27 %, serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir Renstra (Tahun 2026) dengan Nilai target 3,65 maka capaian kinerja sebesar 99,45%.

D. Perbandingan antara target, realisasi kinerja dan capaian kinerja Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional, Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Indikator kinerja

No	Indikator Sasaran	Propinsi	Kabupaten	Dinas Sosial
1	3	4	5	
1	Indeks kepuasan masyarakat	3,42	3,57	3,63

Berdasarkan Tabel 3.13 dapat dilihat bahwa perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Sosial dengan nilai 3,63 berada diatas Pemerintah Kabupaten Solok dengan nilai 3,57 diatas provinsi dengan nilai 3,42.

E. Analisis pendukung / Penyebab Keberhasilan / peningkatan dan hambatan kegagalan/penurunan kinerja serta solusinya.

Tercapainya indeks kepuasan masyarakat meningkat dari tahun sebelum sebesar 100,56% pada tahun 2024 dan pada tahun 2025 sebesar 100,83% disebabkan adanya faktor pendukung anatar lain :

1. Adanya program dan kegiatan yang mendukung peningkatan sarana dan prasarana di lingkup sosial yang menunjang pelayanan publik
2. SDM yang terampil dan memahami tentang Prosedur pelayanan

3. Pelayanan dapat menggunakan aplikasi sehingga memudahkan bagi masyarakat yang membutuhkan.

F. Analisis atas Efisiensi dan efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya yang digunakan untuk mendukung capaian indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kepada masyarakat sangat didukung oleh sarana prasarana dinas sosial, petugas pelayanan di Kantor, pilar pilar sosial (PSM, TKSK, Pendamping PKH, Tagana, dll) yang siap dalam memberikan pelayanan sosial bagi masyarakat dilapangan.

Tabel. 3.14
Efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran

IKU				Keuangan			
	Tar get	Reali sasi	%	Program & Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
Indeks Kepuasan Masyarakat	3,60		100,56	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	356.648.668,93	341.346.411	94,25
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	356.648.668,93	376.365.464	94,90
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.088.319	58.895.680	90,49
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.377.492	21.482.017	84,65
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	266.182.857,93	260.968.714	97,86
				Total Anggaran	356.648.668,93	341.346.411	95,70
Rata- Rata Capaian							
Tingkat Efisiensi					24.302.257,93	7,11%	
Tingkat Efektivitas						104,48%	

Sumber : DPA Dinas Sosial Kab. Solok

G. Analisis Program kegiatan penunjang pencapaian target.

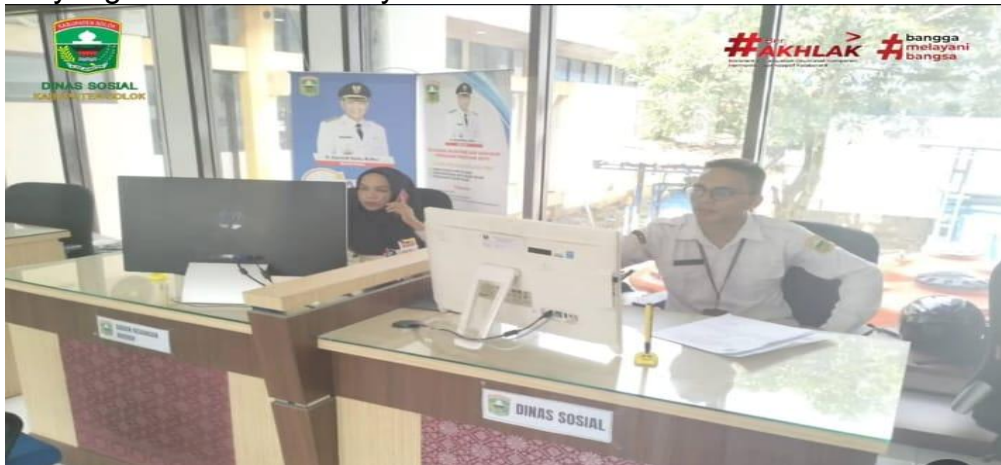
Untuk mencapai dan mendukung tercapainya Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terdapat Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Membenahi seluruh fasilitas penunjang pelayanan publik pada Dinas Sosial
- 2) Melakukan bimbingan bagi petugas pelayanan agar lebih terampil..
- 3) Melakukan koordinasi dengan kementerian terkait, pemerintah dan stakeholder terkait.
- 4) Menginformasikan tentang Pelayanan Publik yang mudah di akses melalui media informasi seperti: web dinas sosial, facebook, instagram, dll.

- 5) Melaksanakan Pelayanan Publik di Loker Mall Pelayanan Publik Kabupaten Solok yang bertempat di Koto Baru Kecamatan Kubung yang tentunya memudahkan akses Masyarakat yang memerlukan Pelayanan



Meningkatnya realisasi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Sosial dapat dibuktikan dengan hasil penilaian dari Ombudsman Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Hasil Penilaian Ombudsman Unit Penyelenggara Pelayanan Publik



REKAPITULASI OPINI OMBUDSMAN RI: PENILAIAN MALADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Pemerintah Daerah : Pemerintah Kab. Solok
Periode Observasi : September-November 2025

No.	Unit Layanan	Dimensi				Kepercayaan Masyarakat	Nilai
		Input	Proses	Output	Pengaduan		
1	Dinas Pendidikan	20.19	19.42	9.38	10.17	21.60	80.77
2	Dinas Sosial	17.40	19.55	9.38	7.75	26.32	80.40
3	Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka Solok	18.38	18.91	9.38	8.21	22.70	77.58
Nilai Akhir		79.58					
Kategori Kualitas Pelayanan		Baik					

No	LHP/LHA/Saran Penyempurnaan/Rekomendasi	Perihal/Dugaan Maladministrasi	Tingkat Kepatuhan
Kategori Tingkat Kepatuhan		-	

Opini	Kualitas Tinggi
-------	-----------------

Dokumen terbatas yang penggunaan dan publikasinya harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Ombudsman Republik Indonesia



Sasaran 1. Meningkatnya Pelayanannya Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kepada Masyarakat dan Korban Bencana Alam/ Sosial

2. Indikator Persentase (%) Pelayanan Sosial yang diberikan terhadap Korban Bencana Alam/ Sosial

Korban Bencana Alam atau Sosial adalah orang atau sekelompok orang yang mengalami kerugian, terluka, meninggal atau mengalami dampak psikologis akibat bencana. Persentase Pelayanan Sosial yang diberikan terhadap Korban Bencana alam/ sosial merupakan Persentase yang Terpenuhi kebutuhan dasarnya yang dihitung pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.

Formulasi Indikator:

$$\begin{aligned} \text{Rumus} &= \frac{\text{Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial}}{\text{Populasi Korban Bencana Alam dan Sosial yang membutuhkan perlindungan dan Jaminan Sosial}} \times 100\% \\ &= \frac{3.329}{3.329} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Persentase (%) Pelayanan Sosial yang diberikan terhadap Korban Bencana Alam/ Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Solok tercapai 100%, dengan artian seluruh korban bencana alam /sosial sepanjang Tahun 2025 telah difasilitasi dengan logistik dan rehabilitasi sosial psikososial.

A. Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.15. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

N o	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kepada Masyarakat dan Korban Bencana Alam/ Sosial	1.2 Persentase (%) Pelayanan Sosial yang diberikan terhadap Korban Bencana Alam/ Sosial	%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel 3.15 diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2025 target Persentase (%) pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam/sosial adalah sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% dan capaian sebesar 100%.

- B. Perbandingan antara target, realisasi kinerja dan Capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra

Tabel 3.16.

Capaian Indikator Persentase (%) pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam/sosial

No	Indikator Sasaran	Target		Realisasi		Capaian (%)		Tahun 2026 (Target akhir Renstra)	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	Target	% capaian
1	Persentase (%) pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam/sosial	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel 3.9 dapat dilihat bahwa Persentase (%) pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam/sosial dibandingkan dengan tahun 2025 tercapai 100 %.

- C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional, Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Tabel 3.17

Perbandingan Realisasi Indikator kinerja

No	Indikator Sasaran	Propinsi	Kabupaten
1	3	4	5
1	Persentase (%) pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam/sosial	100%	100%

Berdasarkan Tabel 3.17 dapat dilihat bahwa Indikator Persentase (%) Pelayanan Sosial yang diberikan Terhadap Korban Bencana Alam/ Sosial Kabupaten Solok Tahun 2025 sebanding dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan nilai realisasi 100%.

- D. Analisis pendukung/penyebab keberhasilan/peningkatan dan hambatan kegagalan /penurunan kinerja serta solusinya.

Tercapainya Kenaikan kinerja pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam/sosial disebabkan oleh **faktor pendukung** sebagai berikut

- 1) Adanya simulasi simulasi rutin untuk menghadapi bencana
- 2) Peranan TAGANA dan Kampung Siaga Bencana yang ada di Nagari.
- 3) Adanya partisipasi semua pihak untuk meminimalisir dampak yang timbul akibat bencana.
- 4) Ketersediaan logistik bencana yang cukup.

Faktor Tindak lanjut

Rencana tindak lanjut yang dilakukan untuk meningkatnya pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam/sosial adalah :

1. Meningkatkan kemampuan SDM TAGANA dalam kesiapsiagaan bencana yang tersebar pada kecamatan di Kabupaten Solok melalui simulasi dan pelatihan .
2. Menambah pembangunan kampung siaga bencana (KSB) guna meminimalisir terjadinya korban akibat bencana.
3. Melibatkan seluruh masyarakat dalam penanganan bencana
4. Menyediakan bantuan logistik dan psikososial bagi korban bencana
5. Menambah ketersediaan lumbung sosial guna percepatan bantuan logistik bagi korban bencana.
6. Menyiapkan sarana dan prasarana seperti kendaraan roda 4 (rescue dan dapur umum) dan peralatan lainnya untuk meminimalisir korban
7. Cepat tanggap melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan bekerja sesuai dengan tupoksi masing masing institusi.
8. Melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala agar data tetap update minimal 3 kali dalam satu tahun.

E. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan Sumber daya

Sumber daya yang digunakan untuk mendukung capaian indikator level pelayanan sosial yang berikan terhadap korban bencana alam/sosial adalah sumber daya yang mendukung sarana dan prasarana. Dimana dalam penanggulangan bencana dibutuhkan TAGANA yang terlatih dan siap siaga dan tersebar di Kecamatan di Kabupaten Solok. Disamping itu dibutuhkan sarana pendukung lainnya seperti bantuan logistik yang cukup untuk didistribusikan kepada korban bencana.

Tabel. 3.18. Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber dana

IKU	Kinerja			Keuangan			
	Targ et	Re alis asi	%	Program & Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
Persentase (%) pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam/sosial	100%	100 %	100 %	Program Penanganan Bencana	530.739.953	486.803.597	91,72
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	530.739.953	486.803.597	91,72

				Penyediaan Makanan	483.621.236	449.674.389	92,25
				Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	43.263.177	37.129.208	85,82
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	43.263.177	37.129.208	85,82
Rata-rata capaian				Total Anggaran	530.739.953	486.803.597	91,72
Tingkat Efisiensi					43.936.356	9,02	
Tingkat Efektivitas					109,02%		

F. Analisis program / kegiatan penunjang pencapaian target.

Untuk mencapai dan mendukung tercapainya kinerja Indikator Persentase (%) pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam/sosial terdapat program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penanganan Bencana

a. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam/ Sosial Kabupaten

1) Bantuan Permakanan

Bantuan permakanan yang diberikan pasca bencana berupa bantuan logistik yang terdiri dari: Beras, Minyak Goreng, Telur, dan Mie Instan.



Penyerahan Bantuan Bencana Kebakaran

2) Bantuan Sandang

Bantuan yang diberikan kepada Korban Bencana Alam/ Sosial berupa Selimut, Kasur, Pakaian, dll.



Pemberian Bantuan Korban Bencana Kebakaran
Di Sungai Nanam

3) Aktifitas Dapur Umum dan Pendirian Tenda

Aktifitas dapur umum adalah menyiapkan dan membagikan makanan kepada korban bencana. Bertujuan untuk Memberikan makanan bagi korban bencana yang tidak dapat mengakses sumber pangan lainnya, Memenuhi kebutuhan pangan korban bencana dan Membantu korban bencana dalam kondisi darurat.





Pendirian Dapur Umum Korban Bencana Hidreometeorologi di Kabupaten Solok



Pendirian Tenda Sementara untuk Korban Banjir

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota

1) Adanya Peran TAGANA (Taruna Siaga Bencana)

TAGANA adalah Singkatan dari Taruna Siaga Bencana, yaitu relawan sosial yang berpartisipasi dalam penanggulangan bencana. TAGANA dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Adapun jumlah TAGANA pada Dinas Sosial Kabupaten Solok berjumlah 39 Orang.



TAGANA Dinas Sosial Kabupaten Solok



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS SOSIAL

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Arosuka, Solok Sumatera Barat

Telepon (0755) 7334003, Faksimile (0755) 7334003

Laman <https://dinsos.solokkab.go.id/> Email dinassosial678@gmail.com

REKAPITULASI KEJADIAN BENCANA KABUPATEN SOLOK

01 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2025

NO.	LOKASI KEJADIAN	TANGGAL	ALAMAT KEJADIAN	JENIS BENCANA	PENYEBAB	KK/JIWA	KORBAN JIWA				KERUSAKAN			RUMAH TERENDAM
		KEJADIAN					MENINGGAL	HILANG	LUKA/S AKIT	MENGUNGSI	RB	RS	RR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Nag. Talang	06 Januari 2025	Gunung Talang	Kebakaran	Korsleting	3 KK/12 Jiwa				12	3			
2	Nag.Aie Dingin	13 Februari 2025	Lembah Gumanti	Bencana Sosial	Miskin Ekstrim	1KK/5 jiwa								
3	Nag Bukit Kandung	17 Februari 2025	x Koto di Atas	Kebakaran	Korsleting	2KK/7 jiwa				2				
4	Nag.Alahhan Panjang	21 Februari 2025	Lembah Gumanti	Kebakaran	Korsleting	1 KK/3 Jiwa				1				
5	Nag.Aie Dingin	21 Februari 2025	Lembah Gumanti	Banjir	Hujan Deras	1 KK/3 Jiwa				1				
6	Nag.Cupak	27 Februari 2025	Gunung Talang	Banjir	Hujan Deras	17KK/68 Jiwa						4	13	
7	Nag.Koto laweh	27 Februari 2025	Lembang jaya	Banjir	Hujan Deras	5 KK / 20 Jiwa						1	4	

8	Nag. Pianggu	27 Februari 2025	IX Koto sei Lasi	Banjir	Hujan Deras	2KK/7 jiwa						2		
9	Nag. Sungai Jambur	27 Februari 2025	IX Koto sei Lasi	Banjir	Hujan Deras	3 KK/12 Jiwa						3		
10	Nag. Koto Baru	27 Februari 2025	Kubung	Banjir	Hujan Deras	50 KK/225 Jiwa							50	
11	Nag. Selayo	27 Februari 2025	Kubung	Banjir	Hujan Deras	50 KK/228 Jiwa							50	
12	Nag. Muaro Paneh	27 Februari 2025	Bukit sundi	Banjir	Hujan Deras	76 KK/305 Jiwa							76	
13	Nag. Koto Hilalang	27 Februari 2025	Bukit sundi	Banjir	Hujan Deras	2 KK/6 jiwa							2	
14	Nag. Saok Laweh	27 Februari 2025	Bukit sundi	Banjir	Hujan Deras	64 KK/215 jiwa							64	
15	Nag. Salimpek	3 Maret 2025	Lembah Gumanti	Tanah Longsor	Hujan Deras	3 KK/11 Jiwa					3			
16	Nag. Kamp batu dalam	4 Maret 2025	Danau Kembar	angin kencang	Angin dan Petir	1 KK/5 Jiwa						1		
17	Nag. Tanjung balik	5 Maret 2025	x Koto di Atas	Tanah Longsor	Hujan Deras	1 KK/3 Jiwa						1		
18	Nag. Aie Dingin	6 Maret 2025	Lembah Gumanti	Tanah Longsor	Hujan Deras	3 KK/12 jiwa						3		
19	Nag. Sibarambang	7 Maret 2025	x Koto di Atas	Tanah Longsor	Hujan Deras	1 KK/10 Jiwa						1		
20	Nag. Koto Baru	7 Maret 2025	Kubung	Pohon Tumbang	Angin dan Petir	3 KK/13 jiwa							3	
21	Nag. Singkarak	30 Maret 2025	Singkarak	Kebakaran	api	3 KK/12 Jiwa							3	
22	Nag. Sungai Nanam	8 April 2025	Lembah Gumanti	Kebakaran	api	1 KK /4 Jiwa					1			

23	Nag. Salimpek	9 April 2025	Lembah Gumanti	Kebakaran	api	12 KK/ 24 Jiwa					12			
24	Nag. Sungai Jambur	13 April 2025	IX Koto sei Lasi	Tanah Longsor	Hujan Deras	20 KK/88 Jiwa					5		15	
25	Nag. Pianggu	13 April 2025	IX Koto sei Lasi	Tanah Longsor	Hujan Deras	4 KK/17 jiwa					1		3	
26	Nag. Guguak sarai	13 April 2025	IX Koto sei Lasi	Pohon Tumbang	Hujan Deras	5 KK / 20 Jiwa						2	3	
27	Nag. Guguak sarai	21 April 2025	IX Koto sei Lasi	Pohon Tumbang	Hujan Deras	1 KK /4 Jiwa						1		
28	Nag Panyakalan	22 April 2025	IX Koto sei Lasi	Kebakaran	konsleting	4 KK/19 jiwa					4			
29	Nag Alahan Panjang	22 April 2025	Lembah Gumanti	Kebakaran	konsleting	1 KK /4 Jiwa					1			
30	Nag Tanjung Balik	23 April 2025	x Koto di Atas	Tanah Longsor	Hujan Deras	1 KK /4 Jiwa						1		
31	Nag Panyakalan	25 April 2025	Kubung	Kebakaran	konsleting	1 KK /4 Jiwa					1			
32	Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh	28 Mei 2025	Lembang Jaya	Angin Kencang	Angin dan Hujan	1 KK/ 4 Jiwa						1		
33	Nagari Kinari	28 Mei 2025	Bukit sundi	Pohon Tumbang	Angin dan Hujan	1 KK/ 5 Jiwa						1		
34	Nagari Koto Baru	28 Mei 2025	Kubung	Keluarga Miskin		2 KK / 7 Jiwa								
35	Nagari Muaro Paneh	28 Mei 2025	Bukit sundi	Lansia Miskin		1 KK / 1 Jiwa								
36	Nagari Salayo	3 Juni 2025	Kubung	Kebakaran	Korsleting	2 KK / 7 Jiwa					1			
37	Nagari Koto Baru	3 Juni 2025	Kubung	Kebakaran	konsleting	3 KK / 12 Jiwa					1			

38	Nagari Muaro Paneh	3 Juni 2025	Bukit sundi	Disabilitas Miskin		1 KK / 5 Jiwa								
39	Nagari Batu Banyak	11 juni 2025	Lembang Jaya	Kebakaran	Korsleting	2 KK / 7 Jiwa						2		
40	Nag. Sungai Nanam	23 juni 2025	Lembah Gumanti	Kebakaran	Korsleting	2 KK / 7 Jiwa					2			
41	Nag Koto Anau	24 Juni 2025	Lembang jaya	Kebakaran	Korsleting	2 KK / 8 jiwa					2			
42	Nag. Aie Dingin	25 Juni 2025	Lembah Gumanti	Kebakaran	Korsleting	1 KK / 5 Jiwa					1			
43	Nag. Aie Dingin	4 Juli 2025	Lembah Gumanti	Puting Beliung	Angin dan Hujan	13 KK/53 jiwa						13		
44	Nag Tanjung Bingkung	7 Juli 2025	Kubung	Kebakaran	korsleting	1 KK / 5 Jiwa					1			
45	Nag. Pianggu	12 Juli 2025	IX Koto sei Lasi	Kebakaran	Korsleting	3 KK/ 10 jiwa					3			
46	Nag. Koto gadang koto anau	16 Juli 2025	Lembang jaya	Kebakaran	Korsleting	1 KK/ 1 Jiwa					1			
47	Nag. Koto gadang koto anau	24 JULI 2025	Lembang jaya	Kebakaran	Korsleting	1 KK/ 2 Jiwa								
48	Nag. Sirukam	16 Juli 2025	Payung Sekaki	angin kencang	Angin dan Hujan	2 KK / 7 Jiwa						2		
49	Nagari Muaro Paneh	29 Juli 2025	Bukit sundi	Lansia Terlantar		1 KK / 1 Jiwa								
50	Nag Tanjung Bingkung	29 Juli 2025	Kubung	Gizi Buruk		1 KK /4 Jiwa								
51	Nagari Muaro Paneh	31 Jul 2025	Bukit sundi	Keluarga Miskin		1 KK /4 Jiwa								
52	Nag. Kamp batu dalam	31 Jul 2025	Danau Kembar	Kebakaran	Korsleting	1 KK / 5 Jiwa					1			

53	NagSalayo	1 Agustus 2025	Kubung	Kebakaran	konsleting	1 KK/3 Jiwa						1		
54	Nag. Kinari	12 Agustus 2025	Bukit sundi	Angin Badai	Angin dan Hujan	2 KK / 8 jiwa							2	
55	Nagari Parambahan	12 Agustus 2025	Bukit sundi	Angin Badai	Angin dan Hujan	4 KK/17 jiwa							4	
56	Nag. Simpang Tanjung Nan IV	26 Agustus 2025	DANAU KEMBAR	Disabilitas Miskin		1 kk								
57	Nag. Alahan Panjang	28 Agustus 2025	lembag gumanti	angin puting beliung		4KK / 16 JIWA								
58	koto baru	28 Agustus 2025	kubung	angin kencang	anign abadi	1 kk/ 5jiwa								
59	nagari taruang-taruang	31 Agustus 2025	IX Koto sei Lasi	Pohon Tumbang		1 kk/3 jiwa								
60	Nag.Koto laweh	02 September 2025	lembang jaya	miskin extrim		5 kk / 11 Jiwa								
61	Nag. Koto Baru	03 September 2025	kubung	miskin extrim		1 kk/ 6 jiwa								
62	Nag Tanjung Balik	03 September 2025	x Koto di Atas	Pohon Tumbang	ANgin badai	1 kk/ 5 jiwa								
63	Nagari Sungai Gando	03 September 2025	Lembah Gumanti	miskin extrim		1 kk/ 4 jiwa								
64	Nag. Sungai Jambur	04 Septmber 2025	IX Koto sei Lasi	miskin extrim		1 kk/1 jiwa								
65	Nag. Koto Baru	04 September 2025	kubung	miskin extrim		1 kk/ 4 jiwa								
66	Nagari lolo	14 September 2025	Pantai Cermin	kebakaran	konsleting	1 kk/ 6jiwa								

67	Nag. Sirukam	18 September 2025	Payung Sekaki	kebakaran	konsleting	1 kk/ 3 jiwa								
68	NAGARI SALIMPAT	03 OKTOBER 2025	Lembah Gumanti	Angin badai	hujan angin	1 kk/ 2 jiwa								
69	Nag. Koto gadang koto anau	03 oktober 2025	Lembang jaya	kebakaran	konsleting	1 kk/ 2 JIWA								
70	nagari salayo	08 oktober 2025	Kubung	angin badai	Angin dan Hujan	10 KK/ 33 JIWA								
71	Nagari Koto Baru	30 Oktober 2025	Kubung	Kebakaran	konsleting	2 KK / 7 Jiwa								
72	Nagari Salayo	5 November 2025	Kubung	Keluarga Miskin		1 KK / 5 Jiwa								
73	Nagari Kinari	6 November 2025	Bukit sundi	Kebakaran	konsleting	1 KK /4 Jiwa								
74	Nag . Muara Panas	12 November 2025	Bukit sundi	Keluarga Miskin		1 KK / 1 Jiwa								
75	Nagari Koto Baru	12 November 2025	Kubung	Kebakaran	konsleting	1 kk/ 3 jiwa								
76	Nagari Paninggahan	13 November 2025	Junjung Sirih	Keluarga Miskin		2 KK / 8 jiwa								
77	Nagarri Sumani	13 November 2025	X Koto Singkarak	Kebakaran	konsleting	1 KK / 1 Jiwa								
78	Nag Simpang Tj nan IV	21 November 2025	Danau Kembar	Banjir	Hujan Deras	8 KK/33 Jiwa								

79	Nagari Batu Banyak	21 November 2025	Lembang jaya	Keluarga Miskin		2 KK / 7 Jiwa								
80	Nag Sirukam	24 November 2025	Payung Sekaki	Kebakaran	konsleting	1 kk/ 3 jiwa								
81	Nagari Koto Baru	24 November 2025	Kubung	angin kencang	Hujan	1 KK/ 2 Jiwa								
82	Nag. Koto Hilalang	25 November 2025	Kubung	Banjir	Hujan	50 KK/265 Jiwa								
83	Nag Koto Sani	25 November 2025	X Koto Singkarak	Banjir	Hujan	42 KK/171 Jiwa								
84	Nag Paninggahan	25 November 2025	Junjung Sirih	Banjir	Hujan	24 KK/97 Jiwa								
85	Nag Saniang Baka	25 November 2025	X Koto Singkarak	Banjir	Hujan	14 KK/58 Jiwa					4			
86	Nag Selayo	25 November 2025	Kubung	Banjir	Hujan	30 KK/142 Jiwa					30		5	
87	Nagari Koto Baru	25 November 2025	Kubung	Banjir	Hujan	19 KK/77 Jiwa					1	1	17	
88	Nag Muaro Pingai	25 November 2025	Junjung Sirih	Banjir	Hujan	40 KK/274 Jiwa					68			
89	Nag Aie Dingin	25 November 2025	Lembah Gumanti	Tanah Longsor	Hujan	12 KK/ 24 Jiwa					8		4	
90	Nag Alahan Panjang	25 November 2025	Lembah Gumanti	Tanah Longsor	Hujan	20 KK/88 Jiwa						5	15	

91	Nagari lolo	28 November 2025	Pantai Cermin	Banjir	Hujan	10 KK/ 33 Jiwa							10	
92	Nag Koto Gadang Guguak	28 November 2025	Gunung Talang	Tanah Longsor	Hujan	15 KK/65 Jiwa					8		7	
93	Nag Simpang Tj nan IV	30 November 2025	Danau Kembar	Tanah Longsor	Hujan	30 KK/129 Jiwa						2	30	
94	Nag Tikalak	30 November 2025	X Koto Singkarak	Banjir	Hujan	15 KK/65 Jiwa							15	
95	Nagari Kacang	30 November 2025	X Koto Singkarak	Banjir	Hujan	17 KK/74 Jiwa							18	
96	Nag Batang Barus	30 November 2025	Gunung Talang	Tanah Longsor	Hujan	10 KK/ 33 Jiwa							10	
	TOTAL					704 KK/3329 Jiwa								

Sasaran 2. Meningkatkan Pelayanan PPKS yang Tertangani melalui Pemberdayaan PSKS

1. Indikator Persentase (%) Pelayanan PPKS yang tertangani melalui pemberdayaan PSKS

Untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya PPKS yang tertangani melalui pemberdayaan PSKS ditetapkan indikator sasaran yaitu Persentase (%) Pelayanan PPKS yang Tertangani melalui Pemberdayaan PSKS yang merupakan perbandingan antara jumlah PPKS yang tertangani dengan jumlah total PSKS.

PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang membutuhkan pelayanan sosial, Sedangkan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) adalah sebutan untuk orang, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang dapat berperan dalam kesejahteraan sosial yang berperan Menjaga kesejahteraan sosial, Menciptakan kesejahteraan sosial, Mendukung kesejahteraan sosial, Memperkuat kesejahteraan sosial.

Persentase (%) Pelayanan PPKS yang tertangani melalui pemberdayaan PSKS pada Dinas Sosial Kabupaten Solok pada Tahun 2024 tercapai 100% dengan artian bahwa seluruh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhan dasarnya.

Formulasi Indikator:

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah Data PPKS yang Telah divalidasi}}{\text{Jumlah PPKS yang Mendapatkan Layanan}} \times 100\%$$

$$= \frac{163 + 482 + 2331 + 20 + 305}{3301} \times 100\%$$

$$= \frac{3301}{3301} \times 100\% = 100\%$$

A. Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.19 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

N o	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya PPKS yang tertangani melalui pemberdayaan PSKS	Persentase (%) Pelayanan PPKS yang tertangani melalui pemberdayaan PSKS	%	100 %	100%	100%

Berdasarkan tabel 3.19 diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Tahun 2025 tercapai, dimana pada Tahun 2025 target Persentase (%) Pelayanan PPKS yang tertangani melalui pemberdayaan PSKS adalah sebesar 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

B. Perbandingan antara target, realisasi kinerja dan Capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam Rentsta

Tabel 3.19.

Realisasi dan Capaian Indikator % pelayanan sosial terhadap PPKS melalui pemberdayaan PSKS

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian (%)		Tahun 2026 (Target akhir Renstra)	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	Target	% capaian
1	Persentase (%) Pelayanan PPKS yang tertangani melalui pemberdayaan PSKS	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel 3.19 di atas dapat dilihat bahwa realisasi Persentase (%) Pelayanan PPKS yang tertangani melalui pemberdayaan PSKS tahun ini dengan tahun sebelumnya sama dengan capaian indikator 100% , serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan tarket akhir Renstra (Tahun 2026) dengan Nilai 100% maka Capaian Kinerja sebesar 100%.

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional, Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Tabel 3.20

Perbandingan Realisasi Indikator kinerja

No	Indikator Sasaran	Propinsi	Kabupaten
1	3	4	5
1	% PPKS yang tertangani melalui pemberdayaan PSKS	100 %	100%

Berdasarkan Tabel 3.20 dapat dilihat bahwa persentase PPKS yang tertangani melalui pemberdayaan PSKS sebesar 100% sebanding dengan Propinsi dengan nilai 100%.

D. Analisis Pendukung / penyebab keberhasilan / peningkatan dan hambatan kegagalan / penurunan kinerja serta solusinya.

Pada indikator Persentase (%) PPKS yang tertangani melalui pemberdayaan PSKS pada tahun 2025 sebesar 100% sedangkan pada tahun 2024 sebesar 100 % terjadi peningkatan capaian dari capaian tahun sebelumnya yang disebabkan oleh :

Faktor pendukung :

1. Banyaknya bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat melalui program jaring pengaman sosial seperti PKH, bantuan sembako non tunai baik melalui APBD/APBN menyebabkan meningkatnya keinginan masyarakat yang belum menerima bantuan sosial untuk diusulkan sebagai penerima manfaat bantuan sosial maupun manfaat jaminan perlindungan sosial.
2. Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang berperan sebagai penghubung atau mediator bagi masyarakat dalam rangka pengusulan data terpadu kesejahteraan sosial yang menjadi acuan atau rujukan dasar bagi masyarakat untuk menerima program bantuan sosial maupun perlindungan sosial dan juga bantuan komplementer yang bersumber dari dana Kementerian Sosial maupun dana Kementerian lainnya yang terkait. Contoh : Syarat untuk mendapatkan subsidi listrik, pengurusan KIP, dll.
3. Melakukan Sosialisasi dan Rakor terhadap Pilar-pilar, Swasta dan Pemerintah



Sosialisasi dan Verval Petugas Data Tunggal Ekonomi Nasional (DTSEN)
Tahun 2025 pada Tanggal 12 November 2025



Rapat Evaluasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Untuk Program Bantuan Sosial tepat Sasaran bagi PSM, TKSK, Operator SIKS-NG Pada Tanggal 9 Desember Tahun 2025



Bimtek tentang Pelaksanaan Kegiatan bagi Pengelola Aplikasi SIKS- NG terkait DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) di Aula Dinas Sosial pada Tanggal 02 September 2025

**SEBARAN GAMBARAN UMUM DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI (DTSEN) DAN PENERIMA
PROGRAM BANTUAN SOSIAL
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025**

Kecamatan	DTIKS Aktif		Penerima PKH (Keluarga)	Penerima Program Sembako Non-Tunai
	Jiwa	Keluarga		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pantai Cermin	23.826	7.233	1.124	1.124
Lembah Gumanti	64.795	18.583	1.711	1.711
Hiliran Gumanti	19.184	5.479	932	932
Payung Sekaki	9.484	3.074	475	475
Tigo Lurah	11.145	3.393	745	745
Lembang Jaya	31.549	9.179	1.711	1.711
Danau Kembar	2.332	6.926	651	651
Gunung Talang	55.335	17.078	2.001	2.001
Bukit Sundi	26.609	8.152	899	899
IX Koto Sungai Lasi	10.603	3.413	657	657
Kubung	63.644	18.975	1.894	1.894
X Koto Diatas	19.105	621	1.077	1.077
X Koto Singkarak	34.199	1.079	1.130	1.130
Junjung Sirih	12.715	3.694	423	423
2025	405.513	122.179	15.430	15.430
2024	221.000	72.676	14.526	22.917

**JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN GELANDANGAN PENGEMIS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2024**

No	Jenis Layanan pemenuhan kebutuhan dasar	Jenis PMKS				Jumlah
		Penyandang Disabilitas Terlantar	Anak Terlantar	Lanjut Usia Terlantar	Gelandangan Pengemis	
1.	Permakanan Diberikan Paling Lama 7 (Tujuh) Hari	61	274	2.144	20	2.499
2.	Sandang	32	244	236	-	512
3.	Alat Bantu	68	-	18	-	86
4.	Perperbekalan Kesehatan	-	-	-	-	-
5.	Bimbingan Fisik, Mental Spiritual, Dan Sosial	6	2	2.331	20	2.359
6.	Bimbingan Sosial Kepada Keluarga	14	482	2.331	-	2.827
7.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan Kartu Identitas Anak	-	-	-	-	-
8.	Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar	-	-	-	-	
9.	Penelusuran Keluarga	3	-	-	-	3
10.	Reunifikasi Dan/Atau Reintegrasi Sosial	3	-	-	-	3
11.	Rujukan	3		-	-	3
J u m l a h		163	482	2.331	20	2.996

E. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan untuk mendukung capaian indikator persentase PPKS yang tertangani melalui pemberdayaan PSKS dalam dokumen perencanaan adalah sumber daya manusia, sumber daya waktu dan sumber daya anggaran. Dengan adanya aplikasi SIKSNG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) sangat mendukung dalam efisiensi penggunaan sumber daya manusia dan waktu. Disamping itu adanya pilar pilar sosial sebanyak 171 orang yang terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 12 Orang, Karang Taruna 47 Orang, Pekerja Sosial 74 Orang dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 38 Orang yang tersebar di Kabupaten Solok yang akan memberikan pelayanan secara langsung kepada PPKS.

Tabel. 3.20.
Efisiensi dan efektifitas anggaran Program/kegiatan

IKU	KINERJA				KEUANGAN		
	Targ et	Real isasi	%	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Persentase (%) PPKS yang tertangani melalui Pemberdayaan PSKS	100 %	100%	100 %	Program Rehabilitasi Sosial	1.300.378.953	1.227.031.320	94,36
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	736.898.653	861.032.762	93,10
				Penyediaan Permakanan	736.898.653	697.265.333	94,62
				Penyediaan Alat Bantu	176.795.773	152.856.535	86,46
				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	11.130.000	10.910.894	98,03
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Korban HIV/ AIDS dan NAPZA si Luar Panti Sosial	375.554.527	365.998.558	97,46
				Pemberian Layanan Kedaruratan	284.768.035	279.416.658	98,12
				Pemberian Bimbingan	73.338.394	70.631.506	96,31

				Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			
				Pemberian Layanan Rujukan	17.448.098	15.950.394	91,42
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	512.207.721,03	492.969.455	96,24
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	512.207.721,03	492.969.455	96,24
				Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	48.188.304	46.847.157	97,22
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	139.621.941,03	133.715.684	95,77
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	324.397.476	312.406.614	96,30
				Program Pemberdayaan Sosial	57.288.561	52.152.634	91,03
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	57.288.561	52.152.634	91,03
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan	57.288.561	52.152.634	91,03

			Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota			
Rata-rata Capaian			Total Anggaran	1.869.875.235,03	1.772.153.409	94,77
Tingkat Efisiensi				97.721.826,03	5,51%	
Tingkat Efektivitas					105,51%	

F. ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Untuk mencapai dan mendukung tercapainya indikator Persentase (%) PPKS yang tertangani melalui Pemberdayaan PSKS terdapat program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Rehabilitasi Sosial

- a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

1) Bantuan Permakanan

Bantuan yang diberikan kepada Lansia Terlantar dan anak terlantar berupa Bantuan Sembako (Beras, Roti Kaleng, Telur, Minyak Goreng, Sarden dan Gula Pasir) , dan Bantuan Nutrisi untuk Anak Terlantar (Madu, Roti Kaleng dan Susu Dancow).





Penyerahan Bantuan Permakanan kepada Lansia Kurang Mampu



Penyerahan Bantuan Nutrisi Untuk Anak Terlantar

2) Penyediaan Alat Bantu

Pemberian Bantuan Alat Bantu berupa Kaki Palsu Amputasi Bawah Lutut, Kaki Palsu Amputasi diatas Lutut, Alat Bantu Dengar, Alat Bantu Kursi Roda, Alat Bantu Tongkat Kaki Tiga, Alat Bantu Tongkat Lipat, Alat Bantu Walker, tangan palsu.



Penyerahan Bantuan Kursi Roda, Tongkat dan Kaki Palsu



Pemberian Bantuan Alat Bantu Kursi Roda
di Kecamatan Lembang Jaya



Pemberian Bantuan Tangan Palsu

3) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

Sosialiasi tentang Pencegahan Anti Bullying kepada Siswa SD, SMP, dan SMA dan Pemberian Bantuan untuk Gelandangan Pengemis (Gepeng) Berupa bantuan Sandang yaitu Selimut, Handuk dan Sarung.



Sosialisasi tentang Pencegahan Anti Bullying kepada Siswa SD, SMP dan SMA di Nagari Gaung Kecamatan Kubung





Pemberian Bantuan Sandang (Selimut, Handuk, dan Kain Sarung) untuk Gelandangan Pengemis di Pasar Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi

4) Pemberian Layanan Rujukan

Melakukan Rehabilitasi ODGJ Terlantar ke Yayasan Pelita Jiwa Insani Padang dan Yayasan Panti Sosial Srikandi Lampung.

b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

1) Pemberian Layanan Kedaruratan

Pemberian bantuan untuk lansia terlantar berupa bantuan sandang (handuk, sarung dan selimut), bantuan perlengkapan sekolah untuk anak terlantar berupa (Buku isi 40, Pena Standard, Sepatu Sekolah dan Tas Sekolah).



Penyerahan Bantuan Perlengkapan Sekolah untuk Anak Terlantar



Penyerahan Bantuan Sandang (Selimut, Sarung dan handuk) untuk Lansia

2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

a. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota

1) Pemberian Bantuan Untuk Masyarakat Miskin Ekstrim

Memberikan bantuan bahan pokok berupa Beras 30 Kg dan minyak goreng 5 Liter per KK dalam rangka upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.



Penyerahan Bantuan Bahan Pokok Pangan untuk Masyarakat Miskin Ekstrim di Nagari Garabak Data Kecamatan Tigo Lurah



Penyerahan Bantuan Bahan Pokok Pangan untuk Masyarakat Miskin Ekstrim di Nagari Aripin Kecamatan X Koto Singkarak

3.3 REALISASI ANGGARAN

Adapun Total Anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2025 adalah sebesar 5.863.438.212,- (Lima miliar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua belas rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 5.537.485.249,- (Lima miliar lima

ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan penyerapan sebesar 94,44%.

Tabel 3.21 Alokasi dan realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program dan Kegiatan		Alokasi dan Realisasi Anggaran			
			Sumber Dana	Jumlah	Realisasi Keuangan	%
1	2		6	7	8	9
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL			5.863.438.212	5.537.485.249	94,44
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		APBD	3.394.749.773,97	3.214.560.875	96,41
	I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		114.734.384	107.826.532	94,69
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		59.510.599	45.879.552	77,09
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		62.575.382	59.701.087	95,41
	II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.591.703.588,04	2.465.749.165	95,14
	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.591.703.588,04	2.465.749.165	95,14
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		116.806.000	109.643.834	93,87
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		116.806.000	109.643.834	93,87
	III	Administrasi Umum Perangkat Daerah		442.112.921,93	421.618.792	95,36
	4	Penyediaan Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		15.788.075	15.098.015	95,63

	5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		69.676.178	65.650.450	94,22
	6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		65.088.319	58.895.680	90,49
	7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		25.377.492	21.482.017	86,45
	8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		266.182.857,93	260.492.630	97,86
	IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	APBD	24.132.497	23.841.000	98,79
	9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.499.575	1.490.000	99,36
	10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		22.632.922	22.351.000	98,75
	V	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	APBD	97.908.786	88.127.445	90,01
	11	Koordinasi Kepegawaian Perangkat Daerah		97.908.786	88.127.445	90,01
B	Program Pemberdayaan Sosial		APBD	57.288.561	52.152.634	91,03
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota		57.288.561	52.152.634	91,03
	14	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota		57.288.561	52.152.634	91,03
C	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			1.300.378.953	1.227.031.320	94,36
	VII	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		924.824.426	861.032.762	94,62

	15	Penyediaan Permakanan		736.898.653	697.265.333	94,62
	16	Penyediaan Alat Bantu		176.795.773	152.856.535	86,46
	17	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		11.130.000	10.910.894	98,03
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Korban HIV/ AIDS dan NAPZA si Luar Panti Sosial		375.554.527	365.998.558	97,46
		Pemberian Layanan Kedaruratan		284.768.035	279.416.658	97,46
		Pemberian Bimbingan Fisik Mental, Spiritual, dan Sosial		73.338.394	70.631.506	96,31
		Pemberian Layanan Rujukan		17.448.098	15.950.394	91,42
D		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		512.207.721,03	492.969.455	96,24
	IX	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		512.207.721,03	492.969.455	96,24
	21	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		48.188.304	46.847.157	97,22
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		139.621.941,03	133.715.684	95,77
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		324.397.476	312.406.614	96,30
E		Program Penanganan Bencana	APBD	530.739.953	486.803.597	91,72
	X	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota		487.476.776	449.674.389	92,25
	22	Penyediaan Makanan		487.476.776	449.674.389	92,25
	XI	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana		43.263.177	37.129.208	85,82

		Kabupaten/ Kota					
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		43.263.177	37.129.208	43.263.177	37.129.208
F		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	APBD	68.073.250	63.967.368	93,37	
	XII	Pemeliharaan Taman Makam Pahlwan Nasional Kabupaten/ Kota		68.073.250	63.967.368	93,37	
	23	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota		68.073.250	63.967.368	93,37	
		Jumlah		5.863.438.212	5.537.485.249	94,44 %	

Sumber : DPA Dinas Sosial Kab. Solok Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinas Sosial merupakan instansi Pemerintah yang diberikan tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial sesuai dengan kewenangannya sebagaimana tertulis dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Sosial berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2025-2029.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial ini menyajikan berbagai keberhasilan dan kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2025.

B. Saran

1. Dalam rangka mempertegas fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang Sosial perlu mempererat peran masing-masing bidang sehingga lebih efektif mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan yang mengacu pada RPJMD dan Renstra SKPD.
2. Diharapkan adanya terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja /Anggaran dari pola “Atas ke Bawah” menjadi “Bawah Ke Atas” sehingga mencerminkan kebutuhan Organisasi.
3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan akan sangat berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan apabila semua *Stake Holder Internal* dapat bersinergi dalam pencapaian target indikator kinerja tersebut.
4. Monitoring dan Evaluasi harus ditingkatkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat tercapai sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
5. Perlunya koordinasi yang mantap didalam tubuh organisasi guna memperoleh ketepatan penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan dapat sesuai RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025, Renstra Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dan Penetapan Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Solok.



Arosuka, Februari 2026
Kepala Dinas Sosial

Ir. DESMALIA RAMADHANUR
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19671203 199403 2 003